

INDUSTRI & PERDAGANGAN

Kemenperin Terus Pacu Industri Fesyen Muslim Nasional Jadi Kiblat Dunia

NERACA

Jakarta - Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Gati Wibawaningsih mengatakan industri busana muslim terus merangkak naik seiring semakin luasnya pasar dan meningkatnya jumlah penduduk muslim di dunia. Global Islamic Economy memprediksi pertumbuhan pasar fesyen muslim dunia pada tahun 2020 akan mencapai USD 327 miliar. Hal ini sejalan dengan nilai ekspor komoditi fesyen yang juga terus meningkat, berdasarkan data Kementerian Perindustrian, nilai ekspor produk fesyen Indonesia pada tahun 2017 telah mencapai USD 13,29 Milyar meningkat 8,7% dari tahun sebelumnya.

"Dengan performance tersebut produk fesyen tanah air mampu menguasai 1,6% pasar dunia. "Untuk itu, pencapaian ini tentunya harus terus digenot sehingga market share industri fesyen terus meningkat yang tentunya akan memperbesar kontribusi sektor fesyen terhadap perekonomian na-

sional," tutur Gati pada pembukaan Muslim Fashion Festival (Muffest) di Jakarta Convention Center, Rabu (19/4).

Lebih lanjut Dirjen IKM mengungkapkan sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk menjadi kiblat fesyen muslim di dunia. Indonesia juga menjadi satu dari lima besar negara anggota Organisasi Kerjasama negara Islam (OKI) sebagai peng ekspor fesyen muslim terbesar di dunia, setelah Bangladesh, Turki, Maroko, dan Pakistan.

Pada Muslim Fashion Festival (Muffest) 2018, Kemenperin dalam hal ini Ditjen IKM memfasilitasi 12 brand fesyen muslim dari berbagai daerah untuk mendukung acara ini. "Kami menilai event ini telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menumbuhkan dan mengembangkan industri fesyen muslim nasional terutama dalam melahirkan desainer dan wirausaha baru di bidang fesyen

muslim yang kreatif dan inovatif," ungkapnya.

Kementerian Perindustrian terus berusaha dan akan menjadikannya sebagai kiblat fesyen muslim di dunia pada tahun 2020. Untuk itu, Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) terus berupaya mengembangkan industri fesyen muslim melalui berbagai program.

Gati mengatakan Kemenperin akan terus mendorong para pelaku industri fesyen muslim dan para desainer untuk terus berinovasi dan meningkatkan produktivitasnya serta memperkuat brandnya sehingga mampu menembus pasar ekspor yang tentunya akan mengharumkan nama Indonesia. "Beberapa waktu lalu kami sudah melakukan pertemuan dengan para desainer, asosiasi, pelaku usaha industri fesyen muslim serta akademisi untuk merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut," jelas Gati. @munib



REGISTRASI ULANG : EVP Area Jabotabek Jabar Telkomsel Ririn Widaryani (kedua kanan) bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Bogor Dodi Ahdiah (kanan) menjelaskan proses registrasi ulang kartu prabayar kepada warga di Kantor Dukcapil Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (19/4). Pelanggan yang layanan komunikasinya terblokir diminta untuk segera melakukan registrasi sebelum masa aktif kartunya berakhir agar bisa berkomunikasi lagi dengan normal.

KERJASAMA BILATERAL

Indonesia AS Sepakati Tingkatkan Perdagangan dan Investasi

NERACA

Jakarta - Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sepakat untuk meningkatkan kerja sama ekonomi kedua negara khususnya bidang perdagangan dan investasi yang diharapkan mampu memberikan keuntungan yang sama bagi kedua belah pihak.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita usai melakukan pertemuan dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr mengatakan bahwa kunci untuk meningkatkan perdagangan adalah perdagangan yang adil, perdagangan bebas dan saling menguntungkan. "Untuk investasi, ada dua kata kunci, yaitu keterbukaan dan kompetitif. Kami sepakat untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan

investasi," kata Enggartiasto di Jakarta, Rabu (18/4).

Amerika merupakan negara tujuan ekspor utama Indonesia, tercatat total ekspor Indonesia pada Januari-Maret 2018 ke negeri Paman Sam tersebut mencapai 4,42 miliar dolar AS, sementara impor sebesar 2,13 miliar dolar AS. Indonesia mengantongi surplus senilai 2,28 miliar dolar AS pada periode tersebut. Enggartiasto menyampaikan keinginan supaya Indonesia tidak dimasukkan dalam daftar 16 negara yang menyumbang defisit perdagangan terhadap Amerika Serikat.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengidentifikasi adanya 16 negara mitra dagang utama yang memiliki neraca perdagangan tidak seimbang selama 2016. Berada di urutan pertama

adalah China yang menyumbang defisit mencapai 347 miliar dolar AS.

Disusul oleh Jepang sebesar 68,9 miliar dolar AS, Meksiko sebesar 63,2 miliar AS, Irlandia 35,9 miliar dolar AS, dan Vietnam senilai 32 miliar dolar AS. Beberapa negara lain yang juga menyumbang defisit neraca perdagangan AS adalah India, Italia, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Perancis, Taiwan, Kanada, dan termasuk Indonesia.

"Kami sudah menyampaikan permintaan supaya kita tidak masuk dalam 16 negara tersebut. Jangan dilihat peta pada 2017 saja, tapi juga perkembangan pada 2018. Salah satu maskapai Indonesia juga telah menandatangani nota kesepahaman pembelian pesawat Boeing, dan masih banyak yang lain," ujar Enggartiasto. @munib

ATURAN DICABUT

Pemerintah Hentikan Perdagangan Gula Rafinasi di Pasar Lelang

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas sehingga kewajiban pelaku usaha untuk mengikuti perdagangan gula rafinasi melalui pasar lelang dihentikan.

■ NERACA

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, mengatakan bahwa keputusan untuk mencabut Permen Dag 73/2017 tersebut setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan rekomendasi yang salah satu poin utamanya menyatakan bahwa mekanisme tersebut menimbulkan biaya tambahan bagi pelaku usaha. "Iya sudah dicabut (atas rekomendasi KPK). Tapi saya sudah menjelaskan apa alasannya dilakukan lelang serta menyampaikan hasil temuannya," kata Enggartiasto, di Jakarta, kemarin.

Rekomendasi KPK yang dikeluarkan pada 12 Maret 2018 tersebut menyatakan bahwa pasar lelang gula kristal rafinasi menimbulkan biaya tambahan bagi pelaku industri besar yang berpotensi dibebankan ke konsumen. Pengawasan di-

sebut tidak perlu dilakukan melalui pasar lelang.

Selain itu, pasar lelang gula tidak secara langsung menyediakan bahan baku bagi usaha kecil menengah (UKM) karena adanya batasan pembelian minimal satu ton gula kristal rafinasi. KPK akhirnya mengeluarkan rekomendasi dan menyebutkan bahwa pengawasan tidak perlu dilakukan melalui pasar lelang.

Namun, beberapa waktu sebelumnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan mencatat adanya indikasi alokasi gula kristal rafinasi (GKR) yang melebihi kebutuhan industri dalam negeri dan berpotensi untuk bocor ke pasar konsumsi.

Dalam masa uji coba penerapan lelang gula kristal rafinasi, pihaknya menemukan indikasi bahwa kebutuhan industri terhadap GKR lebih sedikit daripada

jumlah GKR yang dialokasikan. Hal tersebut berarti terdapat kelebihan pasokan dibanding kebutuhan dan dapat mengarah ke risiko kebocoran. Menurut dia, hasil temuan sudah dilaporkan ke penegak hukum. "Hasil temuan kami sudah dilaporkan ke KPK. Kita menginginkan untuk mengurangi kebocoran, dimana saat ini untuk GKR mengalami over stok," kata Enggartiasto.

Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.16/M-DAG/PER/3/2017, penyelenggaraan pasar lelang gula kristal rafinasi dilaksanakan 90 hari kerja sejak diundangkan pada 17 Maret 2017, atau pada Juli 2017.

Melalui Permen Dag Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perdagangan GKR Melalui Pasar Lelang, Kemendag berwenang mengatur dan mengawasi perdagangan GKR di pasar lelang komoditas. Permen Dag tersebut disempurnakan dengan Permen Dag Nomor 40 Tahun 2017, dan kembali disempurnakan dengan Permen Dag Nomor 73 Tahun 2017.

Saat itu, pemerintah memutuskan untuk menunda pelaksanaan lelang gula kristal rafinasi tersebut

hingga Januari 2018 setelah rapat koordinasi antara Menko Perekonomian Darmas Nasution dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pada 22 September 2017.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan rekomendasi kepada Kementerian Perdagangan untuk menghentikan kewajiban perdagangan gula kristal rafinasi (GKR) lewat pasar lelang komoditas. Rekomendasi diberikan lewat surat dengan nomor bernomor B/1377/LIT.05/01-15/03/2018 kepada Menteri Perdagangan tertanggal 12 Maret 2018.

Dalam surat itu, ada tiga masalah yang ditelaah oleh KPK. Pertama, pasar lelang gula kristal rafinasi menimbulkan tambahan biaya bagi pelaku industri besar yang selama ini sudah bertransaksi secara business to business dengan importir-producen. Tambahan biaya dari proses lelang berpotensi dibebankan kepada konsumen.

Kedua, pasar lelang gula kristal rafinasi tidak serta merta menyediakan kesempatan yang sama kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) atau Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk

memperoleh GKR. Hal ini karena adanya minimum jumlah pembelian sebesar satu ton yang mesti dipenuhi oleh UKM dan IKM.

Terakhir, upaya pengawasan perdagangan gula kristal rafinasi tidak harus dilakukan dengan membentengi pasar lelang. Kementerian Perdagangan dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas stok dan perdagangan gula kristal rafinasi dengan memanfaatkan data dan informasi dari produsen GKR dan industri penggunaannya. Hal serupa juga dapat dilakukan pada tingkat distributor gula kristal rafinasi.

Indonesian Corruption Watch (ICW) menduga ada penyalahgunaan wewenang dalam lelang gula rafinasi di Kementerian Perdagangan. Akibatnya, ICW memperkirakan, adanya kehilangan penerimaan negara sebesar Rp225 miliar.

Adapun dalam proses lelang impor gula rafinasi, PT Pasar Komoditas Jakarta (PKJ) menjadi perusahaan pemenang. "Penyelenggara lelang dapat memperoleh penerimaan sebesar Rp225 miliar. Penerimaan itu belum termasuk biaya lainnya," kata peneliti ICW, Egi Primayogha. @munib

BRM
PT Bumi Resources Minerals Tbk.

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Bumi Resources Minerals Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 14 Mei 2018
Pukul : 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Komplek Apartemen Taman Rasuna Tower 3
The Bridge Function Room
Komplek Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan
Jakarta Selatan 12960

Agenda RUPST

1. Persetujuan atas laporan pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (acquit de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Agenda RUPS LB

1. Persetujuan untuk menjaminkan atau menggunakan atau membebankan dengan hak jaminan kebendaan sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan yang dimiliki langsung atau tidak langsung kepada para kreditur, baik kreditur Perseroan maupun kreditur dari anak perusahaan yang dimiliki, yaitu diantaranya PT Citra Pula Minerals atau PT Dairi Prima Mineral dan/atau PT Gorontalo Minerals, termasuk namun tidak terbatas pada (i) mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg/avaliste); (ii) gadai atas sebagian atau seluruh saham-saham yang dimiliki dan dikuasai Perseroan pada anak perusahaan baik secara langsung atau tidak langsung maupun efek lainnya; (iii) fidusia atas tagihan-tagihan rekening bank, klaim asuransi, persediaan (inventory), rekening escrow Perseroan dan atau anak perusahaan; (iv) jaminan atau agunan atas hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan dan anak perusahaan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman dari pihak ketiga, yang diberikan kepada atau diterima oleh Perseroan maupun anak perusahaan, baik sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 102 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Perseroan Terbatas.

Catatan

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum didaftarkan secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI"), hanyalah Pemegang Saham atau Kuasanya yang terdaftar/tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar, Wisma Bumpuarter, L. M. Suite 209, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910, Telepon (021) 5260976 Fax (021) 5710968.
 - b. Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI, hanyalah pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang namanya terdaftar/tercatat sebagai Pemegang Saham dalam rekening efek anggota Bursa/Bank Kustodian dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI, pemberian kuasa oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening ("DPR") dan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") hanya dapat diberikan kepada Karyawan Pemegang Rekening yang bersangkutan. Sedangkan pemberian kuasa oleh Pemegang Rekening PT KSEI kepada investor yang menjadi nasabahnya untuk hadir dalam Rapat tidak dapat diberikan.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Contoh/bentuk Surat Kuasa dapat diperoleh di kantor Perseroan pada jam kerja melalui Departemen Corporate Secretary Perseroan yang beralamat di Bakrie Tower Lantai 10, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940; telepon: (021-57345698). Surat Kuasa yang sah ditandatangani harus telah diterima kembali oleh Perseroan melalui Departemen Corporate Secretary selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 8 Mei 2018.
6. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menunjukkan kepada petugas pendaftaran Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau identitas lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas tersebut sebelum memasuki Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk badan hukum harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan (perubahannya) serta susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT KSEI dimohon agar menunjukkan KTUR kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah hadir selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 20 April 2018
PT Bumi Resources Minerals Tbk.
Direksi

LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016			LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 DESEMBER 2017 DAN 2016			LAPORAN ARUS KAS Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 DESEMBER 2017 DAN 2016		
	2017	2016		2017	2016		2017	2016
ASET			PENDAPATAN USAHA	52.675	53.596	AKTIVITAS OPERASI		
Kas dan Setara Kas	38.117	50.973	BEBAN USAHA			Penerimaan Bunga	52.675	29.188
Penanaman Bersih Sewa Pembiayaan	493.870	509.192	Beban Keuangan	19.073	24.695	Pembayaran Bunga dan Provisi	(23.528)	(24.695)
Piutang Pembiayaan Karyawan	5.681	2.838	Umum dan Administrasi	37.454	35.054	Pembayaran Kepada Karyawan	(8.373)	(6.177)
Properti Investasi	90.326	108.713	Penyisihan Piutang Ragu-ragu	196	44.493	Pembayaran Lainnya	8.654	(12.336)
Aset Tetap	24.950	26.609	JUMLAH BEBAN	56.723	104.242	Pendapatan Operasional lainnya	3.207	11.932
Aset Lain-lain	15.040	19.567	LABA (RUGI) BRUTO	(4.048)	(50.646)	Penurunan (kenaikan) Aktiva Operasi		
Aset Imbalan Kerja	-	72	Pendapatan (Beban) Lain-lain	6.501	7.719	Penanaman bersih sewa pembiayaan	15.126	107.050
Aset Pajak Tangguhan	376	1.214	LABA SEBELUM PAJAK	2.453	(42.927)	Piutang pembiayaan konsumen	(2.843)	6
JUMLAH ASET	668.360	719.178	Beban (Manfaat) Pajak			Piutang Lain-lain	-	-
LIABILITAS DAN EKUITAS			Pajak kini			Pendapatan yang akan diterima	-	-
LIABILITAS			Tanggungan	663	(1.893)	Biaya Dibayar dimuka	-	-
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	7.224	8.071	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	1.790	(41.034)	Properti Investasi	-	-
Utang Bank	515.670	569.208	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN			Aset Lainnya	-	-
Utang Pajak	178	253	Keuntungan (kerugian) Aktuarial	(596)	(24)	Kenaikan (penurunan) Kewajiban operasi		
Utang Pemegang Saham	40.000	40.000	JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	1.194	(41.058)	Biaya yang msh harus dibayar	-	-
Simpanan Jaminan SGU	12.191	16.646				Simpanan Jaminan SGU	-	(9.924)
Utang Lain-lain	8.189	1.287				Kewajiban Lain-lain	-	-
Kewajiban Imbalan Pasca Masa Kerja	-	-				Pajak Penghasilan	(670)	(1.063)
Kewajiban Pajak Tangguhan	-	-				Kas Neto diterima (digunakan) untuk Aktivitas operasi	44.248	93.981
JUMLAH LIABILITAS	583.452	635.465				AKTIVITAS INVESTASI		
EKUITAS						Perolehan Aset Sewa Operasi	(12.595)	(29.786)
Modal Dasar 500.000 lembar Saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar saham, ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 157.000 lembar saham	157.000	157.000				Penjualan Aset Sewa Operasi	2.126	3.967
Ago Saham	536	536				Perolehan Aset Tetap	-	(2.399)
Cadangan Umum	40.003	40.003				Penjualan Aset Tetap	-	-
Komponen Pendapatan Komprehensif Lain	578	1.173				Kas Neto diterima (digunakan) untuk Aktivitas investasi	(10.469)	(28.218)
Saldo (Rugi) Laba	(113.209)	(114.999)				AKTIVITAS PENDANAAN		
JUMLAH EKUITAS	84.908	83.713				Penambahan Hutang Bank	(46.635)	(78.496)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	668.360	719.178				Penambahan Modal Disetor	-	32.000
						(Kenaikan) Kas yang dibatasi penggunaannya	-	11.342
						Pembayaran Dividen Kas	-	-
						Kas Bersih diperoleh dari (dipergunakan untuk)		
						Aktivitas Pendanaan	(46.635)	(35.154)
						KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(12.856)	30.609
						KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	50.973	20.364
						KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	38.117	50.973

Jakarta, 20 April 2018
PT BRINGIN SRIKANDI FINANCE
S.E & O
DIREKSI